Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)
E-ISSN: 2720-9873 / https://journal.umgo.ac.id/index.php/Tulip/index
https://dx.doi.org/10.31314/tulip.8.2.100-116.2025

Tata Kelola Ketahanan Pariwisata Berkeadilan Gender Terhadap Keberlanjutan Desa Wisata di Kabupaten Toba

Aprilani Lase[1], Siti Aisyah[2], Piki Darma Kristian Pardede[3]
[1-2] Program Studi Pariwisata, Universitas Imelda Medan, Indonesia
[3] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Indonesia

Corresponding Author aprilianilase@gmail.com

Abstract:
One of the main challenges in promoting gender-equitable tourism resilience governance for the sustainability of cultural landscapes in tourist villages is the weak commitment to creating an inclusive tourism ecosystem. This study aims to analyze the integration of gender-sensitive governance with cultural landscape sustainability and how this integration transforms tourism performance to become more efficient and equitable. Using a descriptive qualitative method, the data were analyzed through a feminist institutionalism perspective to examine the roles of institutions, social norms, and policies in influencing women's contributions to tourism governance. The findings indicate that tourist villages prioritizing the principles of transparency, participation, and inclusivity are able to build resilient institutions that adapt effectively to dynamic changes. Nevertheless, women's involvement in strategic decision-making remains limited, and their contributions are often confined to technical levels. Even so, women's active participation in homestay management, culinary practices, handicrafts, and cultural arts significantly contributes to economic diversification and the continuity of local culture. Villages that provide leadership opportunities for women demonstrate greater capacity to sustain cultural regeneration and social solidarity, while those that continue to confine women to domestic roles tend to stagnate in cultural preservation and the strengthening of tourism resilience.

Keywords: Tourism Resilience Management; Gender Equity; Cultural Landscape

Abstrak:
Salah satu persoalan utama dalam mendorong tata kelola pengembangan ketahanan pariwisata berkeadilan gender terhadap keberlanjutan lanskap budaya desa wisata terletak pada lemahnya komitmen menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi tata kelola sensitif gender dengan keberlanjutan lanskap budaya, serta bagaimana hal tersebut mentransformasi kinerja pariwisata agar lebih efisien dan adil. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dianalisis melalui perspektif institusionalisme feminis untuk menelaah peran institusi, norma sosial, dan kebijakan dalam memengaruhi kontribusi perempuan pada tata kelola pariwisata. Hasil temuan menunjukkan bahwa desa wisata yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan inklusivitas mampu membangun kelembagaan yang tangguh sekaligus adaptif terhadap dinamika perubahan. Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas, sehingga kontribusi mereka lebih sering terhenti pada tataran teknis. Padahal, partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan homestay, kuliner, kerajinan, dan seni budaya berperan signifikan dalam menciptakan diversifikasi ekonomi serta menjaga kesinambungan budaya lokal. Desa yang membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan terbukti lebih mampu mempertahankan regenerasi budaya dan solidaritas sosial, sedangkan desa yang masih menempatkan perempuan dalam peran domestik cenderung stagnan dalam pelestarian budaya maupun penguatan ketahanan pariwisata.

Kata Kunci: Tata Kelola Pariwisata; Keadilan Gender; Lanskap Budaya

Under the License CC BY-SA 4.0
Copyright© 2025, Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)

Pendahuluan

Perempuan memegang peranan penting dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan kontribusi tenaga kerja tahun 2022, tercatat tenaga kerja perempuan di sektor pariwisata mencapai 54,22% dan sektor ekonomi kreatif mencapai 68%, dengan jenis home based worker perempuan di sektor pariwisata mencapai 55,38% dan ekonomi kreatif mencapai 49,3% (Pusdatin Kemenparekraf. 2023). Meskipun pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun di sektor pariwisata menurut World Bank-UNWTO menunjukan pekerja perempuan menerima upah 14,7% lebih kecil dibandingkan laki-laki (UNWTO, 2022). Selain itu, permasalahan stereotip gender, keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan akses sektor publik dan strategis masih menjadi isu utama bagi perempuan, baik skala nasional maupun global.

Keterlibatan perempuan menjadi indikator terbangunnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memastikan keterlibatan dan pengakuan untuk dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mendorong masterplan pengarusutamaan gender dalam aspek Pembangunan melalui INPRES Nomor 9 Tahun 2000 yang menegaskan setiap kementerian, lembaga pemerintah non departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota harus mengintegrasikan gender di dalam perencanaan pembangunan nasional (INPRES No.9/2000). Di tingkat daerah, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 yang selanjutnya mengeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Repsonsif Gender (PPRG) menegaskan perlunya integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan utama memberikan manfaat pembangunan yang adil dan setara bagi perempuan (Permendagri No. 67 Tahun 2011). Namun, arah kebijakan ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pembangunan pariwisata salah satunya pada pengelolaan pariwisata di Sumatera Utara.

Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Toba masih belum menunjukkan pariwisata sensitif gender, salah satunya terlihat dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur kelembagaan strategis sektor pariwisata. Keterlibatan perempuan pada struktur penting seperti Lembaga Masyarakat Adat, lembaga perencanaan desa wisata, dan badan pengelola geopark sebagai elemen pendukung pengembangan pariwisata belum pernah mencapai angka ideal minimal 30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam institusi yang menentukan arah pembangunan pariwisata masih belum optimal.

Meskipun perempuan mencakup 54 persen hampir separuh tenaga kerja pariwisata, proporsi ini sebagian besar berasal dari pekerja sambilan tanpa kontrak, pekerja tidak menentu (paruh waktu) sehingga menempatkan mereka pada posisi kerja paling rendah dan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko kehilangan pekerjaan (UNWTO, 2010; Pramesvari, 2020). Lebih jauh, Pembangunan ketahanan pariwisata berkelanjutan mendorong pemberdayaan serta keterlibatan perempuan secara efektif dalam pengembangan pariwisata dimana hal tersebut selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor lima yaitu kesetaraan gender. Disisi lain, permasalahan gender bukan tidak hanya soal ketimpangan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan pariwisata, tetapi sejauh mana peran suatu gender tersebut untuk dapat terlibat dan memiliki hak yang sesuai. (Gutmann, J., et al. 2020).

Ketahanan pariwisata yang adil dan efektif memerlukan partisipasi seluruh aktor, termasuk perempuan, dalam struktur kebijakan di semua tingkatan (Carrasco-Santos et al, 2024; Bridges, D., et al, 2023; Ragasa, C., et al, 2023). Ketimpangan representasi ini menjadi hambatan bagi lahirnya solusi kebijakan kontekstual, terlebih ketika tekanan krisis ekonomi dan konflik sosial

memperlemah kapasitas perempuan sebagai agen perubahan (Pergelova, A., et al, 2019), padahal pengalaman dan pengetahuan lokal mereka sangat krusial dalam membentuk respons keberlanjutan yang adil dan inklusif (Cretney, R, 2014). Ketahanan pariwisata dipahami sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pembangunan sosial, memungkinkan formalisasi sektor informal, promosi mobilisasi sumber daya dan perlindungan lingkungan/konservasi, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan serta promosi investasi serta kewirausahaan dalam pariwisata berkelanjutan (UN, 2025).

Pendekatan ketahanan pariwisata menekankan pentingnya prinsip keadilan prosedural, distributif, dan antargenerasi untuk menjamin adaptasi yang inklusif dan tidak memperdalam ketimpangan (Cañizares, M., et al, 2024; Rastegar, R., & Becken, S, 2024). Pendekatan resilience thinking dan adaptive tourism melihat ketahanan sebagai hasil interaksi antara sistem ekologi dan institusi sosial, dengan partisipasi komunitas, modal sosial, dan respons kelembagaan sebagai faktor utama (Bui, H. T., et al, 2020). Disamping itu, identifikasi atas pendorong ketahanan pariwisata meliputi proses komunikasi dan informasi tentang kesadaran, partisipasi masyarakat dan system ekologi dan manusia merupakan 'drivers' pembangunan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan.

Keadilan gender menjadi elemen krusial dalam mendorong pariwisata berkelanjutan, mengingat peningkatan kesejahteraan dan kapasitas perempuan memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan sektor pariwisata (Alarcón, D. M., & Cole, S., 2021). Relasi antara gender, keberlanjutan, dan pariwisata menunjukkan sifat interdependen, di mana kemajuan pada satu dimensi sangat dipengaruhi oleh transformasi pada dimensi lainnya. Hal ini menuntut pergeseran dari pendekatan feminis konvensional maupun paradigma women and development menuju pendekatan yang lebih inklusif dan transformatif, sehingga menggeser narasi: perempuan bukan hanya pelengkap, melainkan pilar dari masa depan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. (Tucker, 2012; Wilkinson, 1995; Cohen, S. A., 2019; Rinaldi, 2020).

Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual keterlibatan perempuan untuk tata kelola ketahanan pariwisata yang berkeadilan gender dalam manajemen pariwisata, khususnya di wilayah kawasan desa wisata. Pertanyaan utamanya meliputi: bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ketahanan pariwisata lokal dikonstruksi melalui pendekatan berbasis gender? bagaimana keterkaitannya dengan tata kelola pariwisata dan keadilan peran dalam konteks perubahan keberlanjutan lanskap budaya desa wisata? Dan sejauh mana peran perempuan dapat terlibat dan memiliki hak yang sesuai dalam membentuk tata kelola pariwisata yang adil dan kontekstual?. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar strategis bagi perencana kebijakan untuk memetakan kesenjangan gender dan memperkuat ketahanan pariwisata.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif feminis yang secara lebih khusus memusatkan perhatiannya kepada kemangkiran dan ketidaktampakan perempuan di dalam berbagai konteks sosial (Budiman, 2021). Kemampuan penelitian kualitatif untuk menangkap bagaimana interaksi sosial secara rutin dilakukan merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif (Denzin, 2011; Tracy, 2014). Penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didapatkan lewat informasi yang didapat dari subjek penelitian maupun lewat perilaku yang dapat diamati, menggunakan statistik analisis, instrument based question, dan interpretasi menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian kualitatif cocok untuk mendokumentasikan cara-cara dimana makna

dikonstruksi dan dinegosiasikan dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2015). Hal ini akan bermanfaat dalam memahami isu-isu kritis tata kelola ketahanan pariwisata berkeadilan gender dalam membangun berkelanjutan lanskap budaya desa wisata oleh karena keadilan gender berkaitan erat dengan kepemimpinan, perilaku individu, kelompok dan organisasi pemerintahan daerah dalam manajemen pariwisata.

Data penelitian ini diperoleh dari sumber primer melalui, wawancara mendalam, serta pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD). Yang menjadi subjek penelitian (informan) dalam penelitian ini meliputi 5 kepala desa, anggota DPRD, tokoh komunitas adat, pemimpin LSM Perempuan dan pejabat pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) pemerintah daerah Kabupaten Toba. Data sekunder dikumpulkan dari laporan program, dokumen kebijakan pemerintah terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sensitif gender. Selain itu, studi lapangan juga dilakukan untuk menelaah sejauh mana perempuan lokal terlibat dalam penguatan ketahanan pariwisata yang inklusif serta keberlanjutan lanskap budaya di desa-desa wisata Kabupaten Toba. Review terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata ditujukan untuk mengidentifikasi apakah kebijakan-kebijakan pembangunan pariwisata telah mengintegrasikan keadilan gender dalam mempromosikan ketahanan pariwisata inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Toba.

Hasil dan Pembahasan

Keanekaragaman Budaya Desa Wisata di Kawasan Danau Toba

Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) menawarkan kekuatan wisata yang berasal dari perpaduan keindahan alam dan kelestarian budaya lokal berdasarkan tipologi daya tarik wisata sebagaimana digambarkan pada tabel 1. Desa-desa wisata di Kabupaten Toba menjadi ruang penting bagi integrasi pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Selain lanskapnya yang ikonik, kawasan ini mempertahankan tradisi dan kearifan lokal melalui pengelolaan desa wisata yang menggabungkan potensi alam, budaya, dan ekonomi masyarakat. Penyajian hasil penelitian dapat berupa deskripsi, tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan, yang mudah dibaca dan dipahami dengan memperhatikan tata cara penulisan yang umum. Hasil analisis data penelitian, dibahas dengan cara menginterpretasi temuan penelitian dan menjelaskan implikasi hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian.

Tabel 1. Tipologi Daya Tarik Wisata

No	Lokasi/ Kecamatan	Sub-lokasi/Geosite	Keterangan
1	Balige	Dinding Kaldera Selatan Balige-Liang Sipege	Liang Sipege (Tembok Kaldera Batu Kapur)
			Museum TB Silalahi *
			Pantai Lumban Bulbul
			Onan Balerong (Traditional Market)
			Makam Sisingamangaraja XII *
			Pantai Lumban Silintong
2	Tampahan	Dinding Kaldera Selatan Balige-Liang Sipege	Desa Meat (dinding kaldera dasar Paleozoikum) dan kegiatan menenun*
			Panorama Tarabunga

No	Lokasi/ Kecamatan	Sub-lokasi/Geosite	Keterangan
3	Lagu Boti		Huta Tinggi Parmalim (religi)
4	Lumban Julu	Blok Situmurun – Uluan	Air terjun Situmurun
			Blok Geosite Situmurun Uluan
		Taman Eden, dinding Kaldera Timur	Air terjun, dinding batuan Kaldera
			Hutan wisata Taman Eden 100
			Desa Jangga Dolok (permukiman tradisional)*
			Huta Bagasan (rumah tradisional)*
5	Ajibata		Sigapiton Village*
			Resor Terpadu Sibisa (BPODT)
			Bukit Gibeon (religi)

Sumber Data: Hasil Penelitian (2025)

Daya tarik wisata yang ditandai pada tabel 1 merupakan daya tarik budaya. Ajibata, Lumbanjulu, Tampahan dan Balige memiliki daya tarik budaya tangible yang menarik dan sangat relevan, terutama yang berkaitan dengan budaya Batak, seperti Kampung Sigapiton di kecamatan Ajibata dan dan kampung meat di Kecamatan Tampahan. Kondisi budaya Batak saat ini dalam hal kualitas, daya tarik, dan aksesibilitas pada umumnya cenderung medioker.

Meskipun terdapat banyak potensi warisan budaya, kualitas dan variasi pelayanan masih sangat terbatas seperti beberapa elemen budaya seperti pertunjukan seni, kerajinan, dan narasi budaya sering kali belum dikemas secara profesional sehingga kurang mampu menciptakan pengalaman dan memberikan nilai tambah yang mendalam bagi wisatawan.

Upaya untuk mempertahankan, menstimulasi, dan memperkuat warisan budaya tersebut membutuhkan tingkat kesadaran, apresiasi, dan kebanggaan dasar dari masyarakat sebagai produsen, serta wisatawan sebagai konsumen. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan budaya sebagai daya tarik wisata, merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi dari para pemangku kepentingan lokal sebagai 'pemilik' warisan budaya tersebut. Selain itu, dalam kaitannya terhadap unsur fisik yang mencakup desain, konstruksi, pemeliharaan, dan pelestarian, perlu adanya penegakan terhadap peraturan, standar, dan pedoman, melalui pemberian insentif dan insentif.

Disisi lain, keterbatasan fasilitas publik serta penataan ruang yang minim menyebabkan ruang interaksi tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian area tepi pantai digunakan secara ilegal tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Untuk memenuhi standar desa wisata, suatu desa harus memiliki keunikan khas baik kuliner, seni, maupun lanskap alam serta fasilitas pendukung seperti akomodasi dan ruang interaksi.

Tata Kelola dan Kelembagaan Pariwisata

Kabupaten Toba telah menetapkan 36 desa sebagai wilayah potensial pengembangan pariwisata untuk mendorong percepatan ekonomi lokal. Namun, hanya sebagian kecil yang berhasil tumbuh sebagai desa wisata unggulan, karena kebijakan desa wisata belum mengatur secara detail mekanisme tata kelola yang diperlukan. Oleh sebab itu, kemampuan kreator lokal, termasuk keterlibatan perempuan sebagai aktor penting dalam keberlanjutan lanskap budaya.

Sementara itu, tata kelola berbasis kemitraan melalui model pentaheliks, seperti kerja sama bisnis, pembagian peran yang jelas, dan distribusi manfaat, belum mencerminkan dinamika sosial yang memengaruhi tindakan kreator lokal. Interaksi antara kualitas kreator lokal dan tata kelola seharusnya menghasilkan keberlanjutan komunitas yang tampak dalam penguatan kelembagaan, keterlibatan komunitas, peningkatan kunjungan, keuntungan ekonomi, serta inovasi berbasis budaya dan lingkungan. Penelitian ini menegaskan adanya hubungan timbal balik (duality) antara tindakan kreator lokal dan struktur tata kelola dalam membangun desa wisata berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan peran komunitas perempuan dalam tata kelola dan pengembangan ketahanan pariwisata di Kabupaten Toba masih berada pada posisi yang kurang strategis dibandingkan aktor-aktor kunci lainnya, seperti Dinas Pariwisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), operator tur, serta LSM dan universitas. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari struktur formal kelembagaan, tetapi juga dari pola interaksi sosial dan budaya yang mengatur dinamika pengambilan keputusan di tingkat desa wisata.

Dinas Pariwisata dan BUMDes mendominasi arah kebijakan dan alokasi sumber daya. Dengan otoritas regulasi dan dukungan finansial, kedua aktor ini memiliki kontrol penuh terhadap berbagai aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan destinasi, pengelolaan aset, hingga kemitraan strategis dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, dominasi struktur adat, masih menjadi faktor hambatan bagi peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata. Keputusan yang berkaitan dengan ritual budaya, pengelolaan ruang adat, serta pemanfaatan lanskap budaya yang menjadi inti daya tarik wisata tetap dikendalikan oleh figur adat laki-laki. Meskipun perempuan diakui sebagai penjaga tradisi, peran mereka cenderung terbatas pada tugas domestik dan operasional, bukan pada ranah strategis yang menentukan arah pengembangan desa wisata.

Sementara itu, kelompok pemuda dan operator tur menunjukkan perkembangan yang lebih progresif, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan inovasi layanan. Namun, posisi manajerial dan inovatif tetap didominasi laki-laki, sedangkan perempuan hanya memainkan peran administratif atau layanan dasar. Kondisi ini semakin mempersempit peluang perempuan untuk berkontribusi pada aspek kepemimpinan dan manajerial.

Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa rendahnya peran perempuan bukan disebabkan minimnya kontribusi, tetapi lebih pada struktur tata kelola yang belum sepenuhnya inklusif dan masih berorientasi pada aktor-aktor dominan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan strategis, dan ruang representasi membuat perempuan sulit untuk bertransformasi menjadi pengambil keputusan atau pemimpin dalam pengelolaan desa wisata.

Disisi lain, kualitas tata kelola dan kelembagaan pada desa wisata di Kabupaten Toba memiliki variasi yang cukup signifikan antar desa. Peneliti memilih 5 (lima) Desa Wisata dikabupaten Toba sebagai representatif desa yang dinilai cukup memberikan dampak bagi pariwisata di Kawasan danau toba khususnya. Penelitian ini juga menemukan variasi kualitas tata kelola antar desa wisata, diukur melalui enam indikator: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas kelembagaan, kapasitas SDM, dan inovasi. Nilai kualitas tata kelola memberikan gambaran bahwa peningkatan tata kelola yang adil gender menjadi kunci memperkuat keberlanjutan desa wisata di Kabupaten Toba.

Tabel 2. Kualitas Tata Kelola dan Kelembagaan Lima Desa Wisata di Lokasi Penelitian

Desa Wisata	Transparans	Akuntabilitas	Partisipasi	Efektivitas Kelembagaan	Kapasitas SDM	Inovasi Pengelolaan	Nilai Kualitas Tata Kelola
Lintong Ni Huta	70	68	72	69	66	70	69,2
Lumban Bulbul	72	71	74	70	68	75	71,7
Jonggi Ni Huta	60	62	65	63	58	62	61,8
Meat	78	80	82	77	75	77	76,5
Sigapiton	68	66	70	67	64	69	67,3

Sumber: Hasil Penelitian diolah dari laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toba, 2025.

Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa Desa Wisata Meat memiliki nilai kualitas tata kelola dan kelembagaan tertinggi, yaitu 76,5, yang menunjukkan tata kelola paling kuat di antara desa wisata lainnya. Hal ini selaras dengan observasi lapangan yang menemukan bahwa Desa Meat memiliki struktur kelembagaan yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Sementara itu, Desa Wisata Jonggi Ni Huta mencatat nilai kualitas tata kelola dan kelembagaan terendah, yaitu 61,8, yang menandakan kelemahan dalam beberapa aspek utama, terutama pada kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas kelembagaan. Salah satu informan mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, terutama kelompok perempuan dan pemuda, menjadi faktor penghambat pengembangan tata kelola yang lebih inklusif dan adaptif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola desa wisata tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kekuatan jejaring sosial dan kolaborasi eksternal. Secara keseluruhan, desa wisata dengan tata kelola kuat cenderung lebih adaptif terhadap dinamika perubahan tren pariwisata dan fluktuasi kunjungan menunjukkan responsivitas lebih baik terhadap isu keberlanjutan. Hal ini juga menegaskan bahwa tata kelola transparan dan partisipatif menjadi fondasi ketahanan pariwisata serta membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dalam perspektif keadilan gender, tata kelola inklusif memungkinkan perempuan berperan lebih strategis, baik dalam pengambilan keputusan maupun inovasi produk berbasis budaya.

Dari sisi dukungan eksternal, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pariwisata hanya memberikan pendampingan berupa pelatihan manajemen homestay, guiding, dan promosi digital. Namun, tidak semua desa mampu memanfaatkan dukungan tersebut. Desa dengan kelembagaan yang lebih solid (seperti Desa Wisata Lumban Bulbul) mampu memanfaatkan program ini secara maksimal, sementara desa dengan kelembagaan lemah (Desa Wisata Jonggi Ni Huta) justru kesulitan mengimplementasikannya.

Ketahanan Gender dalam Pariwisata

Berdasarkan data Jaringan Desa Wisata (Jadesta) tahun 2024 lebih dari 50% yang terlibat di desa wisata adalah perempuan, tetapi hanya sekitar 23% perempuan yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata di Indonesia. Hal ini juga ditemukan pada 5 desa di kabupaten Toba yang diteliti, proses pengambilan keputusan masih didominasi tokoh masyarakat, sehingga persepsi tradisional tentang peran gender membuat perempuan jarang diundang untuk

terlibat dalam rapat formal. Akibatnya, tingkat partisipasi perempuan menjadi rendah karena pemimpin pertemuan lebih sering mengundang laki-laki.

Dari hasil wawancara menunjukkan nilai-nilai budaya turut mempengaruhi keberanian perempuan untuk menyampaikan pendapat. Kecenderungan ini menyebabkan masukknya perempuan sebagai kelompok rentan dalam pembangunan pariwisata Danau Toba selain masyarakat miskin, dan komunitas lokal. Temuan ini memperlihatkan bahwa struktur budaya berpengaruh kuat terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam pengembangan pariwisata desa. Dominasi laki-laki dalam forum pengambilan keputusan menciptakan hambatan struktural bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasinya.

Keterbatasan akses formal bagi kontribusi perempuan dalam sektor pariwisata malah menempatkan perempuan pada level operasional. Minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan menunjukkan adanya kesenjangan antara keterlibatan formal dan kontribusi nyata perempuan, sehingga strategi pemberdayaan perlu diarahkan pada pembukaan ruang kepemimpinan, peningkatan literasi pariwisata, dan pengakuan formal atas peran perempuan sebagai aktor kunci dalam ketahanan pariwisata desa.

Tabel 3. Jumlah Kelompok Rentan Di Kawasan Danau Toba

Kabupaten	Perempuan		Masyarakat Miskin	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Dairi	3.035	12%	119	12%
Humbang Hasundutan	2.571	10%	101	10%
Pakpak Barat	1.183	5%	53	5%
Karo	3.933	15%	148	15%
Samosir	1.917	7%	76	8%
Simalungun	7.229	28%	269	27%
Tapanuli Utara	3.535	14%	139	14%
Toba	2.758	11%	105	10%
	26.161	**100%**	**1.010**	**100%**

Sumber: Hasil Penelitian dari laporan BOPDT, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa kelompok rentan yang terdiri dari kaum perempuan dan masyarakat miskin di Kabupaten Toba menyumbang 11% dari total jumlah perempuan dan 10% dari total jumlah masyarakat miskin di 8 Kabupaten sekitar Danau Toba. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengembangan program desa wisata masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar, terutama pada aspek integrasi program dan penguatan keadilan gender. Meskipun pariwisata telah diakui sebagai sektor strategis yang mendukung peningkatan ekonomi daerah, pelaksanaannya di tingkat desa belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan.

Dari sisi pengembangan desa wisata, kelemahan utama terletak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Desa wisata yang dirancang hanya sebagai proyek jangka pendek tanpa melibatkan komunitas secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Akibatnya, rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap program ini masih rendah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Toba belum mengintegrasikan strategi pengeloaan pariwisata yang sistematis dan berkelanjutan dalam pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan terintegrasi pada aspek budaya.

Hasil penilaian indeks ketahanan pariwisata berbasis gender (IKP-BG) seperti yang ditampilkan pada tabel 4 menunjukkan masih rendahnya pemenuhan prinsip keadilan gender dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi. Indeks ini merupakan instrumen yang penting untuk memahami sejauh mana sebuah destinasi wisata mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan berdasarkan empat dimensi yang terdiri dari dimensi Tata Kelola Inklusif yang menegaskan perlunya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi lintas aktor agar kebijakan tidak berjalan secara terfragmentasi, melainkan terintegrasi untuk memperkuat daya saing destinasi.

Kemudian dimensi Keadilan Gender yang menilai kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan distribusi manfaat, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan sehingga destinasi menjadi inklusif dan adil. Selanjutnya, dimensi Ketahanan Ekologis–Sosial menekankan kesiapsiagaan risiko, diversifikasi ekonomi, modal sosial, dan kapasitas adaptif masyarakat dalam merespons perubahan. Sementara itu, dimensi keberlanjutan lanskap budaya menyoroti perlindungan situs, pelestarian praktik budaya, pengelolaan zonasi, kapasitas tampung, dan arsitektur vernakular sebagai identitas lokal.

Dengan demikian, keempat dimensi ini saling melengkapi dalam menciptakan kerangka penilaian yang komprehensif, di mana keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keadilan sosial, perlindungan budaya, dan ketangguhan menghadapi perubahan.

Tabel 4. Hasil Indeks Ketahanan Pariwisata Berkeadilan Gender (IKP-BG) per Desa

Desa	TKI	KG	KES	KLB	IKP-BG
Desa Wisata Lumban Bulbul	71,7	62	70	75	69,6
Desa Wisata Sigapiton	67,3	71	66	69	68,3
Desa Wisata Lintong Ni Huta	69,2	58	63	65	63,8
Desa Wisata Meat	76,5	76	72	78	75,6

Sumber Data: Hasil Penelitian (diadopsi dari laporan BOPDT, 2023)

Berdasarkan hasil IKP pada tabel 4, Desa Wisata Meat menunjukkan indeks ketahanan cukup baik di lihat dari integrasi kuat antara pelestarian budaya dan usaha wisata. Sedangkan Desa Wisata Lintong Ni Huta tertinggal dalam partisipasi perempuan dan penegakan zonasi lanskap. Secara keseluruhan kesenjangan antar dimensi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan cukup nampak, begitu juga dukungan kelembagaan dan proses tata kelola belum sepenuhnya mendukung ketahanan jangka panjang.

Pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba merupakan salah satu dimensi penting yang mencerminkan sejauh mana prinsip kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan desa wisata. Dari hasil penelitian, nilai Ketahanan Gender menunjukkan variasi antar desa: Desa Wisata Lumban Bulbul mencatat nilai 62, Desa Wisata Sigapiton 71, Desa Wisata Lintong Ni Huta 58, dan Desa Wisata Meat 76. Rata-rata nilai KG adalah 66,7, yang menunjukkan bahwa secara umum praktik kesetaraan gender di desa wisata sudah berada pada tingkat "cukup", tetapi masih menghadapi tantangan signifikan terutama di desa dengan struktur kelembagaan lemah.

Selanjutnya, tantangan juga muncul dalam aspek akses dan kontrol terhadap sumber daya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun perempuan banyak terlibat dalam aktivitas pariwisata, akses mereka terhadap pelatihan formal, dana hibah, dan aset produktif masih terbatas. Misalnya, di Desa Wisata Lintong Ni Huta, dari 25 peserta pelatihan manajemen homestay dan

pelatihan tematik pelaku usaha UMKM, hanya 6 orang di antaranya perempuan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa masih ada hambatan struktural yang perlu diatasi, baik dalam bentuk norma sosial maupun keterbatasan kebijakan afirmatif.

Ketahanan gender juga erat kaitannya dengan keberlanjutan budaya lokal. Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan mentransmisikan kearifan lokal, seperti dalam tradisi menenun ulos, penyajian kuliner khas Batak, dan pengelolaan upacara adat. Dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pariwisata, kearifan lokal ini tidak hanya terpelihara tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, keberlanjutan lanskap budaya di Kabupaten Toba sangat bergantung pada sejauh mana ketahanan gender diintegrasikan ke dalam tata kelola pariwisata.

Secara keseluruhan, ketahanan gender masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya, rendahnya representasi dalam posisi strategis di beberapa desa, serta masih kuatnya norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan. Namun, praktik baik yang ditunjukkan oleh Desa Wisata Meat memperlihatkan bahwa dengan dukungan kelembagaan yang cukup inklusif, keterlibatan perempuan dapat meningkat signifikan dan memberikan dampak nyata pada keberlanjutan ekonomi sekaligus pelestarian budaya lokal.

Kebutuhan Peningkatan Kapasitas untuk Pengembangan Pariwisata

Pada dasarnya terdapat dua permasalahan mendasar yang dihadapi desa wisata di kawasan Danau Toba. Pertama berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia desa wisata dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kedua berkaitan dengan kompetensi organisasi atau lembaga tempat individu tersebut berada. Kompetensi individu mencakup aspek pengetahuan, wawasan, keterampilan teknis, serta sikap dan perilaku (Jasmin et al., 2024). Sementara itu, kompetensi organisasi berkaitan dengan kewenangan dan kedudukan dalam melaksanakan tugas serta ketersediaan sumber daya pendukung, baik dari segi kecakapan, kemampuan dan keterampilan, kelengkapan sarana, maupun dukungan anggaran operasional (Maldonado-Erazo et al., 2022).

Sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, pemerintah menaruh harapan besar terhadap peran Kawasan Danau Toba dalam meningkatkan perekonomian wilayah serta memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar dan didukung oleh kekayaan budaya yang khas, kondisi desa wisata di kawasan ini masih berada di bawah standar sebagai destinasi unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Hasil observasi menunjukan persoalan dalam pengembangan destinasi wisata di kawasan ini dimana kapasitas pengembangan produk masih terbatas sehingga tidak mampu sepenuhnya menjawab variasi minat wisatawan. Kondisi sarana pariwisata sebagian besar sudah menua dan membutuhkan peningkatan pelayanan. Aksesibilitas menuju kawasan masih belum optimal, baik dari aspek waktu tempuh, kenyamanan, maupun keamanan. Kapasitas pemasaran juga masih rendah; selain diperlukan inovasi produk, juga dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memperluas pangsa pasar potensial seperti Malaysia dan Singapura, termasuk membangun citra destinasi yang lebih kuat.

Di sisi lain, tingkat inovasi masih rendah akibat kendala lingkungan birokrasi, regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya dinamika pasar. Selain itu, kelembagaan pariwisata masih menghadapi tumpang tindih kewenangan, misalnya antara Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dengan pemerintah provinsi, sehingga koordinasi antar kabupaten

menjadi sulit meskipun sangat penting. Keseluruhan permasalahan tersebut mencerminkan tantangan yang harus segera diatasi dari sisi penawaran. Peningkatan kualitas penawaran diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan sekaligus menghindari degradasi destinasi wisata Danau Toba.

Dalam menjalankan kebijakan dan strategi pengembangan kapasitas pariwisata di Kabupaten Toba, Pemerintah daerah dan kelembagaan terkait perlu memahami karakteristik potensi dan kebutuhan apa yang strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitasnya agar dapat berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dirangkum tabel 5.

Tabel 5. Kebutuhan Peningkatan Kapasitas untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Toba

Produk Wisata	Kebutuhan SDM dan Institusi	Isu/Kesenjangan	Kebutuhan Peningkatan Kapasitas
Ekowisata (*Ecotourism*)	**Pemerintah/kelembagaan** - Menyusun program reforestasi yang melibatkan masyarakat. - Menyusun perencanaan pembangunan, serta pengelolaan dan pengendalian Desa wisata berbasis ekowisata (hutan dan geopark). **Masyarakat** Terlibat dalam reforestasi, perlindungan ekowisata, dan pengembangan wisata dikawasa danau toba.	- Beberapa tempat sudah menerapkan ekowisata, namun kurang optimal dalam memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. - Keterbatasan interpreter dan pemandu. - Pengembangan dan pengelolaan ekowisata masih terbatas dan belum dikaitkan dengan pendidikan dan lingkungan. - Pemahaman masyarakat tentang potensi sumber daya alam masih rendah.	- Pelatihan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian ekowisata berbasis masyarakat. - Pelatihan pemandu dan pengelola kawasan ekowisata. - Pelatihan pelayanan ekowisata berbasis masyarakat (*homestay, eco camp).* - Edukasi publik tentang potensi alam dan peranannya dalam pengelolaan Desa wisata.
Wisata Perdesaan *(Rural Tourism*)	**Pemerintah/kelembagaan** - Mampu merancang, mengelola, dan mengendalikan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. - Mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan warga atau kelompok masyarakat desa. - Mampu bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder lain dalam pembinaan masyarakat desa. - Mampu memfasilitasi pengembangan minat dan bakat kelompok marginal (perempuan dan pemuda putus sekolah) melalui pendampingan profesional. **Masyarakat** - Kelompok masyarakat yang mampu merencanakan dan mengelola Desa Wisata (wisata perdesaan) - Kelompok masyarakat yang mampu menggerakkan warga sebagai tuan rumah	- Masih banyak desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata/perdesaan - Pengembangan dan pemasaran Desa Wisata oleh dunia usaha masih terbatas - Rekrutmen kandidiat untuk *social entrepreneur* dan dukungan untuk perusahaan pemula (*start-up)* oleh pemuda dan perempuan - Keterbatasan keterlibatan kelompok rentan, Terkhusus keterlibatan perempuan baik dalam proses perencanaan, pengelolaan, maupun pengembangan lebih lanjut.	- Pelatihan Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemasaran Wisata Perdesaan - Pelatihan Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemasaran Wisata Perdesaan berbasis pelibatan masyarakat terkhusus kelompok perempuan - Pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat terkhusus kelompok perempuan dalam pengembangan desa wisata

Produk Wisata	Kebutuhan SDM dan Institusi	Isu/Kesenjangan	Kebutuhan Peningkatan Kapasitas
	- Masyarakat yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan wisatawan - Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kemampuan mengolah sumber daya di desa dan aset budaya yg ada sebagai daya tarik wisata - Masyarakat yang mampu menjalankan, mengenalkan dan mempromosikan - adat istiadat, norma dan kebiasaan setempat	- Keterbatasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada program-program pengembangan pariwisata - Kurangnya akses perempuan dalam lembaga formal pengelola pariwisata	- Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan potensi Desa Wisata - Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk UMKM - Pelatihan berkesinambungan peningkatan kemampuan bahasa asing - Edukasi publik peran masyarakat dan perempuan dalam peningkatan kemampuan komunikasi dan interaksi (*hospitality*) dengan wisatawan

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2025

Integrasi Tata Kelola Berkeadilan Gender dengan Keberlanjutan Lanskap Budaya

Pedoman desa wisata ramah perempuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024 menegaskan pentingnya pelibatan perempuan dalam kelembagaan, atraksi, fasilitas wisata, serta pengembangan SDM dan model usaha, termasuk penyusunan konten promosi yang melindungi perempuan. Integrasi prinsip tata kelola berkeadilan gender dengan keberlanjutan lanskap budaya menjadi landasan strategis bagi pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjaga integritas sosial, budaya, dan lingkungan. Temuan di Kabupaten Toba menunjukkan bahwa desa wisata dengan tata kelola inklusif dan partisipasi perempuan memiliki kinerja lebih baik dalam pelestarian budaya dibanding desa dengan kepemimpinan yang masih eksklusif.

Data penelitian memperlihatkan bahwa Desa Wisata Meat, yang mencatat nilai tata kelola Inklusif (TKI) tertinggi yaitu (78), juga memperoleh nilai keberlanjutan budaya (KLB) tertinggi sebesar 78. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara tata kelola inklusif dan keberlanjutan budaya. Dalam praktiknya, Desa Wisata Meat melibatkan perempuan dalam posisi strategis, misalnya sebagai koordinator homestay, pengelola festival budaya, hingga pelaku utama dalam produksi kuliner tradisional. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat identitas budaya yang diwariskan.

Sebaliknya, Desa Wisata Sigapiton yang memperoleh nilai rendah dalam TKI (67,3) juga menunjukkan nilai KLB cukup diatas Desa Lintong Ni Huta. Hasil focus group discussion, terutama pandangan pengelola eco-village mengungkap bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menyebabkan pengelolaan pariwisata cenderung bias gender dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, pelestarian budaya berjalan sporadis dan belum terintegrasi dengan strategi pariwisata pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan budaya sulit dicapai tanpa adanya tata kelola yang berkeadilan gender.

Dari sisi dukungan, integrasi tata kelola berkeadilan gender juga berimplikasi pada penguatan jejaring kelembagaan. Desa yang menerapkan tata kelola inklusif umumnya mampu membangun kolaborasi yang lebih solid dengan pemerintah daerah, lembaga adat, serta kelompok perempuan.

Desa Wisata Meat misalnya, yang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan festival budaya karena praktik pengelolaannya dinilai lebih transparan, akuntabel, dan representatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola yang sensitif gender dapat meningkatkan legitimasi desa dalam mengakses berbagai dukungan eksternal.

Namun demikian, sejumlah hambatan tetap muncul. Salah satunya adalah resistensi sebagian tokoh adat yang masih mempertahankan pandangan bahwa urusan budaya merupakan domain laki-laki. Wawancara di Desa Wisata Lumban Bulbul mengungkap bahwa meskipun skor keberlanjutan budaya cukup tinggi (75,0), partisipasi perempuan dalam struktur adat masih bersifat pendukung, umumnya terbatas pada peran domestik dalam kegiatan seremonial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola berkeadilan gender masih dibatasi oleh norma tradisional.

Secara keseluruhan, keberlanjutan lanskap budaya di desa wisata Kabupaten Toba sangat bergantung pada tata kelola inklusif yang mengakomodasi peran perempuan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang adil dan adaptif terhadap kebutuhan pariwisata tanpa memandang gender.

Model Tata Kelola Pengembangan Ketahanan Pariwisata Berkeadilan Gender Di Kabupaten Toba

Bias implisit yang menghambat perempuan dalam kepemimpinan memiliki relevansi kuat dengan dinamika pariwisata berkeadilan gender. Di sektor pariwisata Kabupaten Toba, perempuan sebenarnya menjadi aktor penting dalam pengembangan produk dan pelestarian budaya, tetapi peran mereka tetap terbatas pada ranah operasional, bukan pada posisi strategis. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa stereotip gender dan norma budaya terus membatasi peluang kepemimpinan perempuan (Batson et al., 2002; Rachmawati, 2018).

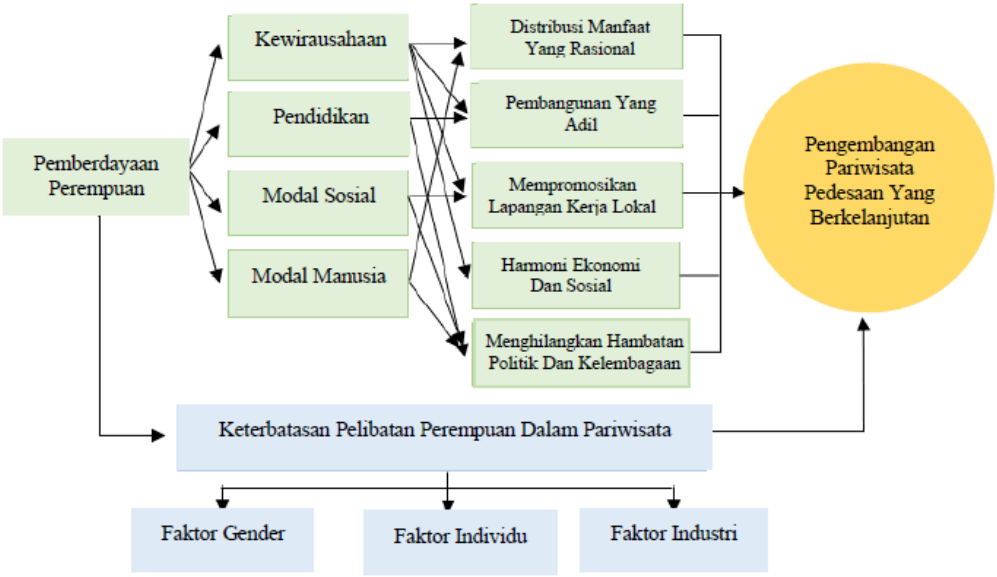
Dari hasil wawancara dengan perwakilan kelompok perempuan ditemukan anggapan bahwa perempuan kurang kompeten secara manajerial mengurangi pengakuan terhadap kapasitas mereka, memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan peluang kolaborasi di desa wisata Kabupaten Toba. Akibat stereotip ini, kapasitas perempuan termasuk pengetahuan lokal, kecakapan manajemen, dan jaringan sosial yang kuat sering kali tidak memperoleh pengakuan yang layak.

Pengelolaan desa wisata masih didominasi laki-laki pada posisi strategis mulai dari kepengurusan badan pengelola, ketua kelompok sadar wisata, hingga kepala desa. Hal ini ditunjukkan dari jumlah 87 kepala desa yang dilantik tahun 2023 hanya ada 1 kepala desa perempuan. Secara keseluruhan dari 231 kepala desa dikabupaten Toba hanya ada 6 kepala desa perempuan, ini menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam porsi perempuan terhadap pembuatan kebijakan di tingkat desa. Dominasi ini membuat suara dan kebutuhan perempuan kurang terakomodasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.

Penguatan kepemimpinan perempuan dalam sektor pariwisata juga memerlukan perpaduan intervensi struktural dan kultural. Secara struktural, pelatihan kepemimpinan, manajemen usaha, peningkatan literasi digital, serta akses pembiayaan melalui skema mikro-kredit atau program wirausaha perempuan akan mendukung kemandirian mereka. Pada saat yang sama, perubahan budaya melalui kampanye kesadaran publik dan pelatihan anti-bias bagi pemangku kepentingan penting untuk mengurangi stereotip peran gender. Dengan ruang partisipasi yang lebih setara,

perempuan dapat menjadi aktor utama dalam mengembangkan pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berbasis komunitas di Kabupaten Toba.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Model Women Tourism Resilience yang menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan. Ketika perempuan diberi ruang memimpin dan berkontribusi secara setara, mereka dapat memperkuat kesejahteraan komunitas sekaligus mendorong praktik pariwisata yang inklusif dan berkeadilan.



Gambar 1. Model Women Tourism Resilience

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1, model tata kelola pengembangan ketahanan pariwisata berkeadilan gender menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan lanskap budaya desa wisata. Pemberdayaan tidak sekadar dimaknai sebagai peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi, tetapi sebagai proses strategis yang membuka ruang kepemimpinan dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks desa wisata, posisi perempuan sebagai penjaga nilai budaya dan penggerak ekonomi keluarga menjadikan pemberdayaan mereka krusial dalam menciptakan inovasi yang memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata.

Kewirausahaan perempuan menjadi elemen penting dalam memperluas peluang ekonomi, terutama pada sektor berbasis budaya seperti kuliner, kerajinan, dan seni pertunjukan. Usaha yang dikelola perempuan tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pelestarian budaya. Oleh karena itu, tata kelola yang berkeadilan gender perlu menyediakan akses terhadap modal, pelatihan, dan teknologi pemasaran digital. Peningkatan kapasitas ini harus diimbangi dengan pendidikan yang memungkinkan perempuan memahami literasi keuangan, teknologi, dan wawasan budaya, sehingga peran mereka meluas dari ranah ekonomi ke ranah pelestarian lanskap budaya desa wisata.

Modal sosial perempuan juga memiliki peran strategis. Jejaring komunitas, kelompok usaha, dan organisasi perempuan memperkuat kerja kolektif dalam pengembangan pariwisata. Jika didukung oleh tata kelola inklusif, modal sosial ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga adat dan kelompok sadar wisata. Selain itu, modal manusia yang mencakup

keterampilan, pengalaman, dan kesehatan perempuan menentukan sejauh mana mereka dapat terlibat secara optimal dalam aktivitas pariwisata.

Dari sisi hasil, distribusi manfaat menjadi indikator utama keberlanjutan. Tata kelola pariwisata berbasis keadilan gender harus menjamin bahwa perempuan menerima manfaat yang proporsional. Prinsip keadilan ini tercermin dalam kebijakan non-diskriminatif yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama dalam setiap tahapan pembangunan desa wisata. Penciptaan lapangan kerja lokal menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi perempuan, karena keterlibatan ekonomi mereka mampu menjaga identitas budaya lokal (Zielinski et al., 2021; Naranjo Llupart, 2022; Dolezal & Novelli, 2022) sekaligus meningkatkan kohesi sosial.

Namun, hambatan politik, struktural, dan industri tetap menjadi tantangan. Akses perempuan terhadap pengambilan keputusan sering terhalang oleh struktur patriarkis, stereotip gender, keterbatasan pendidikan, dan regulasi sektor pariwisata. Karena itu, model tata kelola ini menegaskan bahwa keberlanjutan lanskap budaya hanya dapat dicapai melalui integrasi kebijakan yang menghapus hambatan struktural, memperluas peluang perempuan, dan memperkuat harmoni sosial. Pendekatan ini memastikan desa wisata berkembang secara ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya dan ketahanan pariwisata berbasis keadilan gender.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lanskap budaya desa wisata di Kabupaten Toba sangat erat kaitannya dengan tata kelola pariwisata yang berkeadilan gender. Hasil analisis mengungkapkan bahwa desa wisata yang belum cukup mampu mengintegrasikan prinsip inklusivitas, transparansi, dan partisipasi dalam tata kelola berhasil membangun kelembagaan yang kuat sekaligus adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Tata kelola yang melibatkan perempuan belum secara aktif dilakukan, dan tidak hanya memperkuat struktur organisasi desa wisata, tetapi juga belum cukup menghadirkan perspektif baru dalam proses pengambilan keputusan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

Keterlibatan perempuan terbukti menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pariwisata. Melalui partisipasi dalam pengelolaan homestay, pengembangan kuliner, kerajinan tangan, hingga pelestarian seni budaya, perempuan mampu menciptakan diversifikasi ekonomi yang mendukung keberlanjutan desa wisata. Kondisi ini menjadikan desa lebih tangguh dalam menghadapi fluktuasi pasar, persaingan pariwisata, maupun tekanan eksternal lain yang berpotensi melemahkan sektor pariwisata lokal. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai kekuatan utama yang menopang daya tahan pariwisata.

Selain itu, keterkaitan antara tata kelola berkeadilan gender dengan keberlanjutan budaya sangat jelas terlihat dalam penelitian ini. Desa wisata yang memberi ruang luas bagi perempuan dalam struktur kelembagaan, pengambilan keputusan, maupun kegiatan sehari-hari menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menjaga regenerasi budaya dan solidaritas komunitas. Sebaliknya, desa yang masih menempatkan perempuan hanya sebagai pelaksana teknis atau terbatas pada peran domestik cenderung mengalami stagnasi dalam pelestarian budaya. Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan budaya tidak dapat dipisahkan dari keadilan gender dalam tata kelola pariwisata.

Sebagai penutup, para peneliti menyampaikan apresiasi atas berbagai bentuk bantuan dalam proses penulisan dan publikasi penelitian ini. Penelitian ini juga terlaksana atas dukungan

pendanaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor: 0419/C3/DT.05.00/2025 dengan Perjanjian Kontrak Nomor: 122/C3/ DT.05.00/PL.2025.

Referensi

Alarcón, D. M., & Cole, S. (2021). No sustainability for tourism without gender equality. In Activating critical thinking to advance the sustainable development goals in tourism systems (pp. 57-73). Routledge.

Batson, C. D., Ahmad, N., & Tsang, J. A. (2002). Four motives for community involvement. Journal of social issues, 58(3), 429-445.

Bridges, D., Wulff, E., & Bamberry, L. (2023). Resilience for gender inclusion: Developing a model for women in male-dominated occupations. Gender, work & organization, 30(1), 263-279.

Budiman, C. (2021). Penelitian Feminis dalam Kajian Budaya: Titik-Temu dan Kontribusi. Jurnal Kawistara, 11(1), 102-113.

Bui, H. T., Jones, T. E., Weaver, D. B., & Le, A. (2020). The adaptive resilience of living cultural heritage in a tourism destination. Journal of Sustainable Tourism, 28(7), 1022-1040.

Cañizares, M., et al. (2024). A review of justice concepts in resilience assessments: From retributive to cosmopolitan justice https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095524004474

Carrasco-Santos, M. J., Seyfi, S., Hosseini, S., Hall, M., Almeida-García, F., & Macías, R. C. (2024). Breaking boundaries: Exploring gendered challenges and advancing equality for Iranian women careers in tourism.

Cohen, S. A., & Cohen, E. (2019). New directions in the sociology of tourism. Current Issues in Tourism, 22(2), 153-172.

Creswell JW. Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.

Cretney, R. (2014). Resilience for whom? Emerging critical geographies of socio-ecological resilience. Geography compass, 8(9), 627-640.

Denzin, Norman dan Lincoln (eds), 2009. Handbook of Qualitative Research. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. Journal of Sustainable Tourism, 30(10), 2352-2370.

Gutmann, J., Neuenkirch, M., & Neumeier, F. (2020). Precision-guided or blunt? The effects of US economic sanctions on human rights. Public Choice, 185(1), 161-182.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Integrate Tourism Master Plan Preparation For Lake Toba Report - ITMP 2023. https://bpodt.kemenpar.go.id/integrated-tourism-masterplan-for-lake-toba/

Jasmin, P. R., Mabel, S., Mowainop, A., Watkuk, F., & Oja, H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Basis Perubahan Sosial. Papsel Journal of Humanities and Policy, 1(4), 295-304.

Juliana Bettini. et al. (2025) Global Tourism Resilience Day: Recommendations for Crisis and Disaster Management in the Tourism Sector.

https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/global-resilience-tourism-day-recommendations-for-crisis-and-disaster-management-in-the-tourism-sector/

Maldonado-Erazo, C. P., del Río-Rama, M. D. L. C., Miranda-Salazar, S. P., & Tierra-Tierra, N. P. (2022). Strengthening of community tourism enterprises as a means of sustainable development in rural areas: A case study of community tourism development in Chimborazo. Sustainability, 14(7), 4314.

Naranjo Llupart, M. R. (2022). Theoretical model for the analysis of community-based tourism: Contribution to sustainable development. Sustainability, 14(17), 10635.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pergelova, A., Manolova, T., Simeonova-Ganeva, R., & Yordanova, D. (2019). Democratizing entrepreneurship? Digital technologies and the internationalization of female-led SMEs. Journal of Small Business Management, 57(1), 14-39.

PRAMESVARI, A. S. N. (2020). Analisis Gender dalam Pengelolaan Desa Wisata pada Masa Pandemi. Studi Pustaka, 9(1).

Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf. 2023. Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. https://pusdatin.deputisatukemenparekraf.id/dokumentasi.html

Rachmawati, E. (2018). Tourism and community empowerment: Critical insights from Indonesia (Doctoral dissertation, Lincoln University).

Ragasa, C., et al. (2023). Mainstreaming women's leadership in climate governance: Lessons from multi-level case studies. IFPRI Policy Note. https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/debee896-8b7a-4b40-8ae7-b91c486bce6b/content

Rastegar, R., & Becken, S. (2024). Embedding justice into climate policy and practice relevant to tourism. Journal of Sustainable Tourism, 1–18. https://doi.org/10.1080/09669582.2024.2377720

Rinaldi, A., & Salerno, I. (2020). The tourism gender gap and its potential impact on the development of the emerging countries. Quality & Quantity, 54(5), 1465-1477.

Tracy. Sarah J (2014). Qualitative ReseaRch Methods. Collecting evidence, Crafting analysis, Communicating IMpact. Blackwell Publishing:UK

Tucker, Hazel and Brenda Boonabaana. 2012. "A critical analysis of tourism, gender and poverty reduction". Journal of Sustainable Tourism Vol. 20, No. 3, 437–455.

UN (2025). Global Tourism Resilience Day. https://www.un.org/en/observances/tourism-resilience-day

UNWTO, 2022. Gender Mainstreaming Guidelines for the Public Sector in Tourism.

UNWTO. (2010). Global report on women in tourism (p. 192).

Zielinski, S., Jeong, Y., & Milanés, C. B. (2021). Factors that influence community-based tourism (CBT) in developing and developed countries. Tourism Geographies, 23(5-6), 1040-1072.